

MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN POSO (Suatu Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten Poso)

*Adrian Sakti Mba'u¹
Sofia Pangemanan²
Neni Kumayas³*

Abstrak

Di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Poso memiliki potensi wisata cukup berlimpah dan bervariasi. Obyek wisata di Kabupaten Poso dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu wisata alam serta wisata budaya dan sejarah. Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang strategis untuk dikembangkan di Kabupaten Poso dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dan memperluas lapangan usaha dan kesempatan kerja. Masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Poso sejak lama mengandalkan pemenuhan kebutuhan hidup dari kegiatan pertanian dan pariwisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Manajemen Pemerintahan dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Poso, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat memecahkan masalah penelitian, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian dalam Dinas Pariwisata Kabupaten Poso, dapat dilihat dari struktur organisasi dinas, dari struktur tersebut terlihat tugas pokoknya yang juga dituangkan dalam peraturan daerah. Selain pengorganisasian di dalam tubuh dinas, pengorganisasian juga dilakukan dengan masyarakat khususnya pengelola pariwisata demikian juga dengan aspek penggerakkan yang merupakan tindakan yang mengusahakan agar seseorang atau semua kelompok mau bekerja sama dengan senang hati untuk melakukan tugas pekerjaannya, dalam penelitian ini penggerakkan dilakukan oleh pimpinan dinas yakni kepala dinas dan kepala-kepala bidang, melalui rapat-rapat, apel, selain itu untuk menggerakkan semua pegawai dibuat juga grup-grup di WA dan FB agar informasi mudah disampaikan.

Kata Kunci : Manajemen, Pengembangan, Pariwisata.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Kabupaten Poso juga memiliki berbagai macam obyek wisata yang cukup yang dapat diandalkan antara lain: air terjun Saluopa, Taman Anggrek Bancea, Gua Pamona, Goa Latea, Lembah Bada dan Danau Poso. Dengan melihat berbagai macam objek wisata yang memiliki pesona masing-masing baik pesona alam maupun pesona budaya tentunya dapat dijadikan modal untuk lebih mengembangkan wilayah ini sebagai daerah tujuan pariwisata.

Posisi sektor pariwisata Kabupaten Poso sangat penting sebagai salah satu bisnis di Kabupaten Poso. Dengan penetapan pariwisata sebagai salah satu bisnis, perhatian pemerintah terhadap pengembangan pariwisata seharusnya bertambah besar dan pembangunan pariwisata menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Keunggulan sektor pariwisata dalam konteks regional Sulawesi ditunjukkan pula dengan posisi sektor pariwisata di Kabupaten Poso. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa wilayah menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan, beberapa wilayah lainnya belum menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan namun merupakan salah satu sumber pendapatan walaupun kontribusinya masih kecil. Dari pengamatan tersebut, dibutuhkan manajemen yang tepat di Dinas Pariwisata Kabupaten Poso dan mengelola sector pariwisata, karena dengan adanya manajemen yang baik dari Dinas Pariwisata sebagai UPTD yang ditugaskan untuk mengelola tersebut, maka pengembangan pariwisata daerah akan berkembang dengan pesat dan mampu memberikan dampak positif terhadap nama baik dan pendapatan daerah.

Manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah managing, pengelolaan, sedang pelaksanaannya disebut manager atau pengelola (Terry 2013:1).

Dari pengamatan peneliti di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Poso mengenai manajemen pengelolaan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Poso masih memiliki beberapa hambatan seperti lemahnya perencanaan dan target kerja tahunan yang akan dicapai, kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yakni aparat dinas pariwisata yang belum memadai dalam mengimplementasikan tugas pengembangan dilapangan serta kurangnya pengawasan dari pimpinan dinas dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Poso, selain itu dari 3 bidang yang ada di Dinas terlihat terjadi tumpang tindih pekerjaan seperti bidang pengembangan dan pemasaran, namun juga telah ada bidang pengembangan wisata serta bidang perencanaan dirangkap dengan bidang keuangan oleh sebab itu fungsi pengorganisasian di Dinas Pariwisata Kabupaten Poso menjadi tidak fokus pada satu bidang, hal tersebut berpengaruh terhadap fungsi manajemen lainnya seperti pada pergerakan pegawai dan tahap evaluasinya, bidang yang satu dapat mengcopy hasil kerja bidang yang lain

Tinjauan Pustaka

Manajemen memiliki peran penting dalam menggerakkan segala sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Karena itu dalam menjalankan suatu organisasi,

segala macam aktifitas yang telah direncanakan sangat berkepentingan sekali dengan manajemen, dan manajemen sangat erat sekali kaitannya dengan kepemimpinan, peranan antar pribadi, pemberi informasi dan pengambilan keputusan sehingga proses manajemen dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Menurut Saleh (2010: 9). Sebagai alat mencapai tujuan, organisasi itu tidak boleh tinggal diam atau statis, melainkan harus bergerak melalui beberapa proses yang dinamakan manajemen, dengan kata lain bahwa manajemen itu merupakan penggerak dalam tubuh organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan terlebih dahulu. menurut Salih bahwa manajemen adalah sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain.

Menurut Hasibuan, (2012:3). adalah : Management is a distinct process consisting of planing, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being ang other resources.

Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Manajemen dan pengelolaan memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi atau lembaga. Ini dikatakan bahwa manajemen dan pengelolaan merupakan istilah yang memiliki tujuan yang sama. Menurut Terry manajemen adalah suatu proses

yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahannya, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Manajemen merupakan suatu bentuk kegiatan, atau disebut "managing", sedangkan pelaksanaannya disebut dengan "manager" atau pengelola. Manajemen juga adalah suatu ilmu pengetahuan maupun seni. Seni adalah suatu pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan atau dalam kata lain seni adalah kecakapan yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan, dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen. G.R. Terry dalam bukunya Principles of Management yang dikutip oleh Dharma Setyawan Salam bahwa :

Management is a distinct process consisting of planing, organizing, actuating, and controlling, utilizing in each both science and art, and followed on order to accomplish predetermined objectives.

Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Melalui pemanfaatan baik ilmu maupun seni seperti, kemampuan dan kemahiran dalam mengerjakan tugas-tugas, memiliki cita rasa yang tinggi dalam pembangunan segala sektor, dan mempunyai penampilan yang khas sebagai penguasa atau pemimpin. Oleh sebab itu sebagai inti manajemen dikenal istilah kepemimpinan,

sedangkan sebagai inti kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Untuk melakukan serangkaian tindakan tersebut dapat diidentifikasi.

Definisi pariwisata menurut United Nation World Tourism organization (Antariksa 2016:19) :“ Tourism comprises the activities of persons traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business, and other purposes ”. (kepariwisataan meliputi berbagai aktivitas yang dilakukan oleh orang yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di suatu tempat diluar lingkungannya yang biasa, selama waktu tidak lebih dari satu tahun secara terus menerus, untuk rekreasi, kegiatan bisnis dan tujuan lainnya) . Di dunia internasional hanya mengenal istilah tourism sementara di Indonesia terdapat banyak istilah yang lebih lanjut dijelaskan dalam UU kepariwisataan no 10 Tahun 2009 sebagai berikut :

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. .

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.

Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Definisi pariwisata atau kepariwisataan (Nugroho 2014:329) memiliki ruang lingkup dan kegiatan yang sangat luas, setidaknya meliputi 5 jenis kegiatan meliputi:

- 1) Wisata bahari (beach and sun tourism)
- 2) Wisata pedesaan (rural and agro tourism)
- 3) Wisata alam (natural tourism)
- 4) Wisata budaya (cultural tourism)
- 5) Perjalanan bisnis (business travel)

Menurut Yoeti, pengembangan adalah usaha atau cara untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan perencanaan yang matang sehingga bermanfaat baik bagi masyarakat, baik juga dari segi ekonomi, sosial dan juga budaya. (Sefira Ryalita Primadany 2013)

Menurut Yoeti, wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan sementara

waktu ke tempat atau daerah yang sama sekali masih asing baginya. Oleh karena itu sebelum seorang wisatawan melakukan perjalanan wisatanya, terlebih dahulu kita menyediakan prasarana dan sarana pariwisata seperti berikut :

1. Fasilitas transportasi
2. Fasilitas akomodasi
3. Fasilitas Catering Service
4. Obyek dan atraksi wisata
5. Aktivitas rekreasi
6. Fasilitas pembelanjaan
7. Tempat atau took

Semua ini merupakan prasarana dan sarana kepariwisataan yang harus diadakan sebelum kita mempromosikan suatu daerah tujuan wisata. Sedangkan mengenai prasarana (infrastruktur) adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata di daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata. Sarana pariwisata terbagi menjadi tiga bagian penting, yaitu :

1. Sarana Pokok Pariwisata (Main Tourism Superstructures) adalah: Hotel, Villa, Restoran.
2. Sarana Pelengkap Pariwisata (Supplementing Tourism Superstructures) adalah: wisata budaya dan wisata alam.
3. Sarana Penunjang Pariwisata (Supporting Tourism Superstructures) seperti pasar seni, kuliner, oleh-oleh dan cinderamata kerajinan khas daerah.

Dalam pengembangan pariwisata tentu harus diperhatikan hal-hal yang berpengaruh dalam pelaksanaannya. Yoeti (2010:78) mengatakan bahwa prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar

sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang, sehingga dapat memberikan pelayanan untuk memuaskan kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam. Prasarana tersebut antara lain:

1. Perhubungan: jalan raya, rel kereta api, pelabuhan udara dan laut, terminal.
2. Instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih.
3. Sistem telekomunikasi, baik itu telepon, telegraf, radio, televisi, kantor pos, dan lain-lain.
4. Pelayanan kesehatan, baik puskesmas atau rumah sakit.
5. Pelayanan keamanan, baik pos satpam penjaga objek wisata maupun pos-pos polisi untuk menjaga keamanan di sekitar objek wisata.
6. Pelayanan wisatawan, baik berupa pusat informasi atau kantor pemandu wisata.
7. Pom bensin.
8. Dan lain-lain.

Kegiatan pariwisata banyak yang memanfaatkan potensi alam, sosial dan budaya. Alam yang indah sangat potensial untuk kegiatan wisata. Keanekaragaman seni dan budaya suatu daerah juga sangat potensial untuk pariwisata. Berbagai tarian adat, rumah adat, seni musik, makanan khas daerah merupakan contoh budaya yang potensial untuk kegiatan wisata. Berbagai bangunan bersejarah dan bernilai seni seperti candi, dan benteng juga banyak dimanfaatkan untuk wisata. Indonesia sedang menggalakkan kegiatan pariwisata dengan membuka wisata-wisata baru. Dengan adanya obyek wisata banyak mendatangkan wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan banyaknya kunjungan berarti meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu dibukanya

obyek wisata juga banyak membuka peluang usaha ditempat wisata, antara lain berdagang souvenir, sewa tikar, jasa foto, transpornasi dan lain-lain.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci yang lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2012:46). Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah atau objek yang apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian naturalistic merupakan penelitian yang sumber datanya diperoleh dari situasi wajar (natural setting) atau tanpa adanya manipulasi. Informan penelitian yaitu stakeholders dan yang memungkinkan memberikan data dalam penelitian yaitu :

- Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Poso
- Kepala Bidang Pariwisata
- Pegawai Dinas Pariwisata
- Masyarakat Pengelola lokasi wisata

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini adalah: Manajemen Pemerintahan dalam Pengembangan Pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Poso dengan menggunakan teori dari Hasibuan yang mengatakan bahwa Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan : Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengendalian yang dilakukan untuk

untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Hasil Penelitian

Fungsi pengendalian (controlling) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengendalian ini berkaitan erat dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena :

- a) Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan.
 - b) Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana.
 - c) Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan baik.
 - d) Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan.
- Pemahaman mengenai fungsi pengendalian dikemukakan oleh beberapa ahli. Seperti menurut George R. Terry dalam buku Principles of Management mengemukakan pengendalian dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilaksanakan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Menurut Harold Koontz (Hasibuan, 2013 : 241-242) pengendalian artinya pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara. Sedangkan Earl P. Strong (Hasibuan, 2013 : 241) mengatakan

bahwa pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dan rencana.

Dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa pengendalian dilakukan oleh Pimpinan Dinas yakni Kepala Dinas dan Kepala-Kepala Bidang. Menurut Kepala Dinas bahwa pelaksanaan pengendalian tidak terlepas dari pengawasan kepada bawahan. Beliau mengatakan :

“Dalam rangka menjalankan fungsi pengendalian, saya selaku pimpinan selalu menjalankan fungsi pengawasan melekat kepada setiap bawahan. Dengan begitu bawahan merasa dihargai dan juga dapat memotivasi mereka. Kalaupun saya tidak ada saya mendelegasikan tugas tersebut kepada sekretaris atau kepala bidang”.

Pengendalian dalam pelaksanaan program di Dinas dapat dilihat pada Laporan Kinerja dinas yang disusun setiap tahunnya. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Pasal 18 ayat 1 dan 2 maka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai kinerja yang telah dicapai dalam tahun 2018. Diharapkan pula adanya masukan-masukan sebagai umpan balik yang bernilai manfaat dan alternatif pemecahan masalah dalam pelaksanaan tugas yang bermuara pada upaya peningkatan kinerja. Penyempurnaan yang terus menerus dilakukan akan berwujud pada upaya pelayanan umum secara maksimal dan optimal kepada seluruh lapisan masyarakat melalui pelaksanaan otonomi daerah yang konstitusional.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata, Pelaksanaan asas akuntabilitas dapat dilihat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Poso sehingga dapat dijadikan tolak ukur bagi peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Dari hasil analisis yang dilakukan dalam internal Dinas Pariwisata, masih terdapat beberapa permasalahan strategis menyangkut pengembangan sector pariwisata di Kabupaten Poso. Permasalahan strategis (strategic issued) Dinas Pariwisata Kabupaten Poso yaitu capaian kinerja organisasi yang belum maksimal karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki antara lain :

- a. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kepariwisataan
Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya wisatawan mancanegara berkunjung ke Kabupaten Poso, karena kurangnya sarana penunjang kepariwisataan yakni, hotel, rumah makan, sarana transportasi, sarana telekomunikasi, sarana olahraga, tempat hiburan, sarana perbelanjaan yang dapat memenuhi standar pelayanan untuk level wisatawan mancanegara.
- b. Belum Adanya Regulasi Jaminan Bagi Wisatawan
Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Poso, belum ada regulasi yang dapat menjamin keamanan, kesehatan, kecelakaan selama berada di obyek wisata, sehingga terkadang wisatawan merasa tidak nyaman berada di Kabupaten Poso, terutama wisatawan mancanegara dimana kenyamanan dan keamanan merupakan hal yang prioritas.
- c. Belum adanya Rencana Induk Pengembangan Wisata Kabupaten Poso.

(RIP) yang merupakan pedoman dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan daerah, diperburuk dengan kurangnya pengembangan database kepariwisataan, kurangnya aksesibilitas ke dan dari tempat pariwisata serta rendahnya kualitas sarana dan prasarana pariwisata.

d. Rendahnya kualitas media promosi, jangkauan promosi dan informasi pariwisata juga menyebabkan kurang dikenalnya daya tarik wisata daerah di lingkungan yang lebih luas.

Untuk mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapi, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Poso sebagai berikut :

a. Mengefektifkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan pembagian tugas dan tanggung jawab secara kolektif (tim) sehingga adafungsi kontrol bagi setiap orang pada bidang tugas masing-masing.

b. Melakukan pengembangan obyek pariwisata unggulan dengan penataan obyek wisata yang lebih menarik dan menyediakan fasilitas yang memadai bagi wisatawan.

c. Meningkatkan kinerja aparatur dengan mengirim staf mengikuti diklat-diklat yang akan menunjang operasional kegiatan.

d. Mengefektifkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan

Kesimpulan

1. Dalam Manajemen Pemerintahan, tahap perencanaan merupakan tahapan yang penting karena dengan adanya perencanaan, maka pegawai akan mampu bekerja dengan suatu tujuan. Di Dinas Pariwisata Kabupaten Poso, tahapan perencanaan berdasarkan visi

dan misi bupati yang kemudian dituangkan dalam rencana strategis dinas kemudian rencana kerja dan dituangkan dalam program kerja.

2. Pengorganisasian dalam Dinas Pariwisata Kabupaten Poso, dapat dilihat dari Struktur orgnisasi dinas, dari struktur tersebut terlihat tugas pokoknya yang juga dituangkan dalam peraturan daerah. Selain pengorganisasian di dalam tubuh dinas, pengorganisasian juga dilakukan dengan masyarakat khususnya pengelola pariwisata.

3. Aspek penggerakkan merupakan tindakan yang mengusahakan agar seseorang atau semua kelompok mau bekerja sama dengan senang hati untuk melakukan tugas pekerjaannya, dalam penelitian ini penggerakkan dilakukan oleh pimpinan dinas yakni kepala dinas dan kepala-kepala bidang, melalui rapat-rapat, apel, selain itu untuk menggerakkan semua pegawai dibuat juga grup-grup di WA dan FB agar informasi mudah disampaikan

4. Pengendalian dalam Penelitian ini juga berarti pengawasan yang dilakukan kepada bawahan, dari hasil penelitian pengendalian yang dilakukan oleh Kepala Dinas menerapkan pengawasan melekat kepada bawahan. Namun masih terdapa beberapa kelemahan dalam organisasi dalam pengembangan yakni sarana prasarana, kebijakan untuk wisatawan dalam hal jaminan, kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata, serta lemahnya promosi yang dilakukan.

Saran

1. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dinas, disarankan bagi dinas untuk mengadakan focus group discussion (FGD) dengan masyarakat, pemerhati pariwisata, dan pengelola

pariwisata untuk menentukan program yang tepat sasaran dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Poso.

2. Pengorganisasian perlu di tingkatkan intensitasnya dengan membuka pos pengaduan publik dan masukan dari masyarakat, bukan hanya melibatkan pengelola pariwisata, agar masyarakat berkontribusi dalam pengembangan pariwisata.

3. Dalam rangka menjaga fungsi penggerakkan dengan baik dalam tubuh dinas, perlu adanya konsistensi dari dinas itu sendiri, selain itu juga koordinasi antar bidang perlu ditingkatkan agar informasi dapat terserap dengan baik oleh pegawai.

4. Disarankan kepada Kepala Dinas dan pimpinan dinas untuk membuat permintaan pengembangan sarana dan prasarana kantor, juga meningkatkan permintaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana objek wisata. Dengan adanya sarana dan prasarana penunjang, maka pengembangan pariwisata mudah untuk dicapai selain itu perlu adanya keseriusan dari pemerintah daerah dan semua elemen yang termasuk dalam pariwisata untuk pembuatan kebijakan yang mendukung pariwisata serta promosi yang dapat menarik minat wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antariksa, Basuki. 2016. Kebijakan pembangunan kepariwisataan. Malang: Intrans publishing
- Emerson. 2015. Sumber Daya Manusia dan Efektifitas. Jakarta: Ilham Jaya
- Hasibuan, Malayu. 2013. "Manajemen Sumber Daya manusia". Jakarta: PT Bumi. Aksara
- Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset
- Nugroho, Iwan. 2014. Pembangunan Wilayah. Jakarta: LP3ES.
- Primadany, Ryalita Sefira, Mardiyono, Riyanto. 2013. Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 4, Hal. 135-143.
- Salam, Dharma Setyawan. 2014. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Shafritz J.M., Ott J.S, dan A.C. Hyde, 2009. Public Management: The Essential Reading, Chicago, Il: Lyceum Books/ Nelson-Hall Publisher
- Saleh A.M. 2010 . " Manajemen Pelayanan ". Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung. Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana, 2012, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bandung: Refika Aditama,
- Terry, George R. dalam Afifudin. 2013. Dasar-dasar Manajemen, (Terje: G.A Ticoalu), CV. Alfabeta,Bandun
- Yoeti A.Oka. 2010. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Yulia Asyiwati.2012. Pengembangan Wisata Bahari Di Wilayah Pesisir Selatan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Jurnal PWK Unisba
- Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.

Peraturan Bupati Poso Nomor 46 tahun
2016 Tentang Uraian Tugas Fungsi
dan Kerja Dinas Daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) 2018

Rencana Kerja (RENJA) 2019

Rencana Strategis (RENSTRA) 2017-
2021

